

Nada Kurnianingsih

(D3 Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Putra Bangsa)

nadakurnianingsih8@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Jumlah Penduduk, Pendapatan Asli Daerah, dan Belanja Modal terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu data Laporan Realisasi Anggaran tahun 2015-2018 dan data dari Badan Pusat Statistik Jawa Tengah tahun 2015-2018. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian menggunakan sampel jenuh yaitu 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah dalam kurun waktu empat tahun sehingga berjumlah 140 sampel. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan regresi linier berganda dengan *SPSS for 23 Windows*, pengujian berupa uji t, uji F, dan uji koefisien determinasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Jumlah Penduduk dan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Kesejahteraan Masyarakat, sedangkan Belanja Modal tidak berpengaruh terhadap Kesejahteraan Masyarakat.

Kata Kunci: Jumlah Penduduk, Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, Kesejahteraan Masyarakat.

Abstract

This study aimed to analyze the effect of Total Population, Local Revenue, and Capital Expenditures on the Welfare of Regency/City Communities in Central Java Province. This study uses secondary data, namely the 2015-2018 Budget Realization Report data and data from the Central Java Central Statistics Agency 2015-2018. The sampling technique in the study used saturated samples, namely 35 regencies/cities in Central Java Province within a period of four years so that there were 140 samples. The hypothesis in this study was tested multiple linear regression with SPSS for 23 Windows, testing in the form of t test, F test, and the coefficient of determination test. The results showed that the Total Population and Local Revenue affected Community Welfare, while Capital Expenditures did not affect Community Welfare.

Keywords: Total Population, Local Revenue, Capital Expenditures, Community Welfare

PENDAHULUAN

Pembangunan merupakan alat yang digunakan untuk mencapai tujuan bangsa. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mencantumkan tujuan bangsa Indonesia yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam

pelaksanaan pembangunan, pertumbuhan ekonomi yang tinggi adalah sasaran utama bagi negara-negara yang sedang berkembang. Hal ini disebabkan pertumbuhan ekonomi berkaitan erat dengan peningkatan barang dan jasa yang diproduksi masyarakat, sehingga dengan semakin banyak barang dan jasa yang

diproduksi maka kesejahteraan masyarakat meningkat.

Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2009, Kesejahteraan Masyarakat adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup lebih layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat mengembangkan fungsi sosialnya. Pemerintah daerah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pembangunan manusia yang tercermin dari Indeks Pembangunan Manusia.

Pembangunan manusia diartikan "*a process of enlarging people's chiches*" yang merupakan tahap dalam peningkatan hidup manusia. Hal ini terungkap dalam publikasi *United Nations Development Programme* (UNDP) melalui *Human Development Report* tentang Konsep Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pembangunan manusia masih harus ditingkatkan untuk keberhasilan pembangunan. Informasi tentang perkembangan masyarakat merupakan suatu masukan yang penting dalam proses perencanaan pembangunan. Karena dengan keberhasilan pembangunan manusia, maka kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut akan meningkat.

Indeks pembangunan manusia (*Human Development Indeks*) merupakan suatu ukuran ketercapaian pembangunan manusia yang berbasis pada beberapa komponen dasar kualitas hidup. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dapat digunakan sebagai alat ukur keberhasilan pembangunan di suatu daerah. IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar yaitu umur panjang, kesehatan, pengetahuan (pendidikan), dan kehidupan yang layak (ekonomi). Dimensi kesehatan diukur dengan menggunakan angka hidup waktu lahir. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup yang layak.

Jumlah penduduk yang terus meningkat dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut karena jumlah penduduk bisa menjadi faktor penghambat atau faktor pendukung dalam pembangunan daerah. Sebagai faktor penghambat apabila kualitas penduduk di daerah tersebut rendah dan sebagai pendukung apabila kualitas penduduk di daerah tersebut tinggi. Dalam mewujudkan kesejahteraan penduduk diperlukan upaya untuk meningkatkan sarana dan prasarana seperti infrastruktur dalam sektor pendidikan, kesehatan, dan transportasi agar masyarakat dapat menikmati langsung manfaat dari pembangunan daerah yang berdampak terhadap kesejahteraan. Maka dibutuhkan pengalokasian belanja yang tepat untuk perencanaan pembangunan daerah.

Penerimaan daerah dapat bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah. PAD merupakan salah satu sumber penerimaan daerah. Jika PAD meningkat, maka dana yang dimiliki oleh pemerintah daerah akan lebih tinggi dan tingkat kemandirian daerah akan meningkat pula. Pemerintah daerah akan berinisiatif untuk menggali potensi-potensi daerah dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam upaya kesejahteraan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa PAD suatu daerah meningkat, maka kemampuan daerah untuk melakukan pengeluaran belanja modal juga akan mengalami peningkatan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, yaitu adanya pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut asas otonomi. Pemerintah daerah diharapkan dapat menggali dan memanfaatkan sumber daya daerah masing-masing dan dialokasikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah daerah juga dapat mengalokasikan sumber-sumber pendapatan dan belanja sesuai dengan kebutuhan daerah yang bersangkutan.

Berdasarkan uraian latar belakang, penulis tertarik melakukan penelitian untuk mengetahui pengaruh jumlah penduduk,

pendapatan asli daerah, dan belanja modal terhadap kesejahteraan masyarakat dengan judul **“Pengaruh Jumlah Penduduk, Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah”**.

METODE

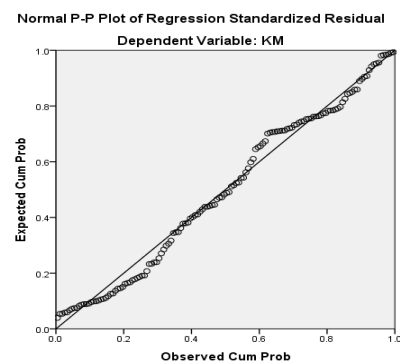
Objek dalam penelitian ini yaitu kesejahteraan masyarakat Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Menurut Sugiyono (2018:7), metode kuantitatif yaitu datanya berupa angka-angka dan analisis yang dilakukan menggunakan statistik. Data penelitian ini bersumber dari data sekunder karena data yang dibutuhkan sudah terkumpul dan dipublikasikan oleh pihak-pihak yang terkait. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah yang berjumlah 35, dalam kurun waktu empat tahun sehingga berjumlah 140 sampel. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini yaitu menggunakan sampel jenuh sehingga keseluruhan populasi digunakan sebagai subyek penelitian. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode dokumentasi. Metode dokumentasi dilakukan dengan cara mencari, mengolah, dan mencatat data yang berhubungan dengan penelitian ini. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu, Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 sampai dengan 2018, Jumlah Penduduk, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 sampai dengan 2018. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji hipotesis berupa analisis regresi linear berganda. Dalam analisis regresi linear berganda, agar persamaan regresi layak digunakan atau diaplikasikan maka harus memenuhi uji asumsi klasik yaitu, uji normalitas (*normality*), uji multikolinearitas (*multikolinearity*), uji heteroskedastisitas, uji autokolerasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Jawa Tengah adalah sebuah Provinsi di Indonesia yang terletak dibagian tengah Pulau Jawa. Ibu kotanya yaitu Semarang. Provinsi ini berbatasan dengan Provinsi Jawa Barat, Samudra Hindia dan Daerah Istimewa Yogyakarta di sebelah selatan, Jawa Timur di sebelah timur, dan Laut Jawa di sebelah utara. Luas wilayahnya 32.548 km² atau sekitar 28,94% dari luas pulau Jawa. Provinsi Jawa Tengah juga meliputi Pulau Nusakambangan di sebelah selatan (dekat dengan perbatasan Jawa Barat) serta Kepulauan Karimun di Laut Jawa.

Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder. Data dalam penelitian ini berupa data realisasi Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal tahun 2015 sampai dengan tahun 2018, data Jumlah Penduduk dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Tengah tahun 2015 sampai dengan 2018. Data yang sudah diperoleh kemudian dilakukan pengujian data dengan uji asumsi klasik, uji regresi linier berganda, uji hipotesis menggunakan aplikasi *SPSS 23 for Windows*.

Ghozali (2018:160), uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Distribusi normal akan membentuk satu garis lurus diagonal dan plotting data residual akan dibandingkan dengan garis diagonal. Jika distribusi data normal, maka garis akan menggambarkan data yang sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya.



Gambar 1 Hasil Uji Normalitas

Berdasarkan gambar IV.1 dapat dilihat bahwa data menyebar diikuti sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi tersebut memenuhi asumsi normalitas dan dapat dipakai dalam penelitian ini.

Ghozali (2018:107), uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antara variabel independen. Jika nilai *tolerance* variabel independen $\geq 0,10$ dan nilai $VIF \leq 10$ menunjukkan bahwa tidak adanya multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi, bila terjadi multikolinearitas berarti tidak lolos uji tersebut. Hasil pengujian multikolinearitas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1
Hasil Pengujian Multikolinearitas

Coefficients^a

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
JP	.585	1.709
PAD	.414	2.417
BM	.322	3.104

a. Dependent Variable: KM

Berdasarkan tabel IV.2 terlihat bahwa jumlah penduduk memiliki nilai *tolerance* 0,585 yang menunjukkan lebih dari 0,10, pendapatan asli daerah memiliki nilai *tolerance* 0,414 yang menunjukkan lebih dari 0,10 dan belanja modal nilai *tolerance* 0,322 yang menunjukkan lebih dari 0,10. Kemudian nilai *Variance Inflation Factors* (VIF) untuk jumlah penduduk sebesar 1,709 yang menunjukkan kurang dari 10, pendapatan asli daerah nilai VIF sebesar 2,417 yang menunjukkan kurang dari 10 dan belanja modal nilai VIF sebesar 3,104 yang menunjukkan kurang dari 10. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model

yang terbentuk tidak terdapat adanya gejala multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi.

Ghozali (2018:111), uji autokorelasi bertujuan untuk menguji dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Pada penelitian ini, untuk mengetahui ada atau tidaknya autokorelasi digunakan uji *Durbin-Watson*.

Tabel 2
Hasil Pengujian Autokorelasi

Model Summary^b

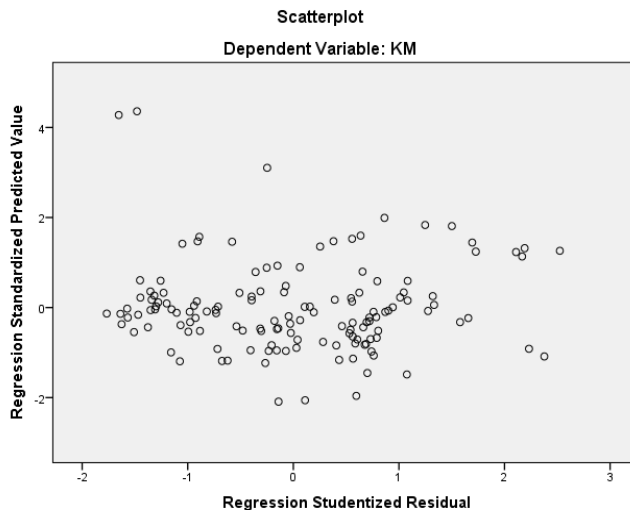
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.781 ^a	.609	.601	2.84636	1.826

a. Predictors: (Constant), BM, JP, PAD

b. Dependent Variable: KM

Berdasarkan tabel IV.3 menunjukkan bahwa nilai Durbin-Watson sebesar 1,826. Nilai ini akan dibandingkan dengan nilai tabel menggunakan signifikan 5%, jumlah sampel (n) = 140 dan jumlah variabel independen (k) = 3. Nilai *Durbin-Watson* 1,826 lebih besar dari 1,7830 (du) dan lebih kecil dari 2,217 (4-du), maka dapat disimpulkan bahwa hasil dari pengujian *Durbin-Watson* diterima, sesuai dengan kategori yang terdapat pada tabel keputusan *Durbin-Watson* sehingga pada model regresi tidak terdapat gejala autokorelasi.

Ghozali (2018:137), uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Salah satu cara untuk mendiagnosis adanya heteroskedastisitas dalam satu model regresi adalah dengan melihat grafik plot. Hasil pengujian heteroskedastisitas dapat dilihat pada tabel berikut ini:



Gambar 2
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan gambar IV.2 dapat dilihat bahwa titik-titik yang ada tidak membentuk pola tertentu dan titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas dalam model regresi.

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Analisis ini menggunakan program *SPSS 23 for Windows*. Analisis regresi linier berganda tersebut menggunakan rumus sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan:

Y = Variabel dependen (Kesejahteraan Masyarakat)

α = Konstanta

X_1 = Variabel independen pertama (Jumlah Penduduk)

X_2 = Variabel independen kedua (Pendapatan Asli Daerah)

X_3 = Variabel independen ketiga (Belanja Modal)

β_1 = Koefisien regresi variabel X_1

β_2 = Koefisien regresi variabel X_2

β_3 = Koefisien regresi variabel X_3

e = error merupakan variabel bebas yang tidak diketahui mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen

Hasil penelitian disajikan dalam bentuk tabel dari analisis regresi linier berganda sebagai berikut:

Tabel 3
Hasil Pengujian Regresi Linier Berganda

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients	
	B	Std. Error
1 (Constant)	73.935	.645
JP	-8.120442146	.000
PAD	1.559954168	.000
BM	-1.298458332	.000

a. Dependent Variable: KM

Berdasarkan tabel IV.4 diperoleh hasil estimasi model dapat ditulis persamaan regresi sebagai berikut:

$$\text{Kesejahteraan Masyarakat} = 73,935 - 8,120\text{JP} + 1,559\text{PAD} - 1,298\text{BM} + e$$

Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa:

- Nilai konstansa (α) sebesar 73,935 menyatakan bahwa pada saat variabel independen yaitu jumlah penduduk dan belanja modal bernilai 0, pendapatan asli daerah bernilai 1,559. Maka kesejahteraan masyarakat bernilai 73,935.
- Nilai koefisien variabel jumlah penduduk - 8,120 menjelaskan bahwa setiap penurunan 1,00 jumlah penduduk akan menurunkan kesejahteraan masyarakat sebesar 8,120.
- Nilai koefisien pendapatan asli daerah 1,559 menjelaskan bahwa setiap tambahan 1,00 pendapatan asli daerah akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebesar 1,559.
- Nilai koefisien belanja modal -1,298 menjelaskan bahwa setiap penurunan 1,00 belanja modal akan menurunkan kesejahteraan masyarakat sebesar 1,298.

Uji t menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel Independen (Jumlah Penduduk, Pendapatan Asli Daerah, dan Belanja Modal) secara individual dalam

menerangkan variasi variabel dependen (Kesejahteraan Masyarakat) dengan tingkat signifikan $\alpha = 0,05$. Hasil dari pengujian signifikan parameter individual sebagai berikut:

Tabel 4 Hasil Uji t

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		T	Sig.
	B	Std. Error		
1 (Constant)	73.935	.645	114.642	.000
JP	-8.120E-6	.000	-10.685	.000
PAD	1.560E-11	.000	9.856	.000
BM	-1.298E-12	.000	-.556	.579

a. Dependent Variable: KM

Berdasarkan tabel IV.5 Hasil perhitungan statistik menunjukkan bahwa tiga variabel yang dimasukkan dalam model signifikan, dua variabel (jumlah penduduk dan pendapatan asli daerah) mempengaruhi kesejahteraan masyarakat dan belanja modal tidak mempengaruhi.

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel independen atau terikat. Pengujian ini dilakukan dengan melihat nilai probabilitas signifikansi (Sig.). F yang dibandingkan dengan batas signifikansi yang ditetapkan yaitu sebesar 0,05. Hasil dari pengujian signifikansi simultan sebagai berikut:

Tabel 5

Hasil Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

ANOVA^a

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regresion	1718.654	3	572.885	70.711	.000 ^b
Residual	1101.840	136	8.102		
Total	2820.494	139			

a. Dependent Variable: KM

b. Predictors: (Constant), BM, JP, PAD

Hasil uji F pada tabel IV.6 menunjukkan diperoleh nilai F_{hitung} sebesar 70,711 dengan tingkat signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa secara bersama-sama variabel jumlah penduduk, pendapatan asli daerah, dan belanja modal berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat.

Uji koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur besarnya untuk mengukur besarnya prosentase pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil pengujian koefisien determinasi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.781 ^a	.609	.601	2.84636

a. Predictors: (Constant), BM, JP, PAD

b. Dependent Variable: KM

Berdasarkan tabel IV.7 hasil tampilan *output model summary* menunjukkan bahwa besarnya *Adjusted R Square* adalah 0,601, hal ini berarti bahwa 60,1% yang menunjukkan bahwa kesejahteraan masyarakat dipengaruhi oleh variabel jumlah Penduduk, pendapatan asli daerah, dan belanja modal. Sedangkan sisanya 39,9% dipengaruhi variabel lain yang belum diteliti dalam penelitian ini.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Jumlah penduduk (X_1) memiliki nilai Sig. sebesar $0,000 < 0,05$ menunjukkan bahwa variabel jumlah penduduk berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Adanya jumlah penduduk yang meningkat akan menurunkan kesejahteraan masyarakat karena semakin banyak penduduk tidak menjamin semua penduduk memiliki kualitas yang baik,

sehingga menyebabkan penurunan kesejahteraan masyarakat.

2. Pendapatan asli daerah (X_2) memiliki nilai Sig. sebesar $0,000 < 0,05$ menunjukkan bahwa variabel pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Adanya pendapatan asli daerah yang meningkat maka ketergantungan pemerintah daerah akan dana dari pemerintah pusat (Dana Alokasi Umum) semakin rendah sehingga meningkatnya PAD akan membantu kebutuhan dana penyelenggara kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3. Belanja modal (X_3) memiliki nilai Sig. sebesar $0,579 > 0,05$ menunjukkan bahwa variabel belanja modal tidak berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Tidak berpengaruhnya belanja modal terhadap kesejahteraan masyarakat karena masih rendahnya belanja modal yang dialokasikan untuk upaya kesejahteraan masyarakat dan pelaksanaannya kurang tepat sasaran.

Saran

Bagi Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah

1. Pemerintah daerah mampu menggunakan alokasi belanja modal yang tepat untuk pembangunan dengan jumlah penduduk yang meningkat setiap tahun di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi. Khususnya di bidang pendidikan untuk meningkatkan tenaga kerja yang berkualitas.
2. Pemerintah daerah mampu menggali potensi-potensi daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dan memanfaatkan dana yang bersumber dari pendapatan asli daerah untuk membangun infrastruktur publik serta meningkatkan sarana dan prasarana umum guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3. Pemerintah daerah mampu mengalokasikan belanja modal dengan bijak dan tepat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Bagi Penulis Selanjutnya

1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan untuk melakukan penelitian

berikutnya dengan menambah atau mengganti variabel.

2. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menambah tahun atau memperluas wilayah yang ada di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Akhmad. 2019. *Manajemen Keuangan Daerah Dalam Era Otonom Daerah*. Cetakan Pertama. Azkiya Publishing. Yogyakarta.

Astika. P. B. I., Astuti. I. A. P. 2016. Pengaruh Jumlah Penduduk, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 17(3): 2416-2446.

Badan Pusat Statistik. 2018. *Indeks Pembangunan Manusia*. BPS Jawa Tengah.

_____. 2018. *Indeks Pembangunan Manusia Jawa Tengah Berstatus Tinggi*. BPS Jawa Tengah.

_____. 2018. *Statistik Daerah Provinsi Jawa Tengah*. BPS Jawa Tengah.

Baeti. N. 2013. Pengaruh Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengeluaran Pemerintah terhadap Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007-2011. *Economics Development Analysis Journal*.

Budiasih. I. G. A. N., Williantara. G. F. 2016. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, dan Dana Alokasi Umum Pada Indeks Pembangunan Manusia. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 16(3): 2044-2070.

Dewi. I. G. A. A., Supadmi. N. L. 2016. Pengaruh Alokasi Belanja Rutin dan Belanja Modal Pada Indeks Pembangunan Manusia. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 14(1): 695-722.

- Dwirandra. A. A. N. B., Pradnyantari. P. M. 2017. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal Pada IPM Variabel Pemoderasi Dana Alokasi Umum. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 19(1): 536-564.
- Ghozali. 2018. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25*. Edisi Kesembilan. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Halim, A. 2012. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Keempat. Salemba Empat. Jakarta.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006. *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*. 15 Mei 2006. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005. *Standar Akuntansi Pemerintah*. 13 Juni 2005. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49. Jakarta.
- _____. Nomor 38 Tahun 2007. *Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota*. 9 Juli 2007. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82. Jakarta.
- _____. Nomor 71 Tahun 2010. *Standar Akuntansi Pemerintah*. 22 Oktober 2010. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123. Jakarta.
- Pertiwi. I. F. P., Rahmayati. A. 2018. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Indeks Pembangunan Manusia. *Journal of Islamic Finance and Accounting* 1(1): 45-62.
- Prihastuti. A. H. 2018. Pengaruh Alokasi Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota Riau. *Menara Ekonomi* 4(1).
- Putra. P. G. H., Ulupui. I.G. K. A. 2015. Pendapatan Asli daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Untuk Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 11(3): 863-877.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Manajemen*. Alfabeta. Bandung
- Supadmi. N. L., Sari. I. A. C. Y. 2016. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal Pada indeks Pembangunan Manusia. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 15(3): 2409-2438.
- Rotinsulu. T.O., Rumat. V. A., Tarumingkeng. W. A. 2018. Pengaruh Belanja Modal dan Tingkat Kemiskinan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah* 19(6).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009. *Kesejahteraan Sosial*. 16 Januari 2009. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12. Jakarta.
- _____. Nomor 34 Tahun 2000. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. 20 Desember 2000. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246. Jakarta
- _____. Nomor 32 Tahun 2004. *Pemerintah Daerah*. 15 Oktober 2004. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125. Jakarta.
- _____. Nomor 33 Tahun 2004. *Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*. 15 Oktober 2004. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126. Jakarta.